

Iman yang Membebaskan: *Vital Christianity* William Wilberforce sebagai Model Teologi Publik Injili Konstekstual di Asia

Dwi Kurniawan^{1*}, Dwi Maria Handayani²

¹ Sekolah Tinggi Teologi Bandung

² Sekolah Tinggi Teologi Bandung

*Dwi Kurniawan (jede.kurniawan82@gmail.com)

Submitted:
19 Maret 2026

Revised:
16 Juni 2026

Accepted:
19 Juni 2026

Abstrak

Artikel ini menafsirkan ulang konsep *vital Christianity* dalam pemikiran William Wilberforce sebagai sumber refleksi bagi pengembangan teologi publik injili dalam konteks Indonesia. Melalui pendekatan historis-teologis dan rekonstruksi kontekstual, penelitian ini menunjukkan bahwa spiritualitas injili dalam tradisi Wilberforce tidak dapat direduksi menjadi kesalehan privat, melainkan memiliki implikasi publik yang berkaitan dengan tanggung jawab etis terhadap ketidakadilan sosial. Dalam proses rekonstruksi tersebut, *vital Christianity* dibaca ulang dalam dialog dengan realitas Asia-Indonesia kontemporer, khususnya fenomena perbudakan modern seperti perdagangan orang, eksploitasi pekerja domestik, dan kerja paksa. Alih-alih mengasumsikan model Wilberforce sebagai pola yang dapat direplikasi secara langsung, artikel ini memahami warisannya sebagai sumber prinsip teologis yang perlu ditransformasikan melalui konteks sosial yang berbeda, termasuk melalui kritik teologi Global sebagai *locus* refleksi. Melalui kerangka tersebut, spiritualitas Kristen yang hidup (*vital Christianity*) hanya dapat dipahami secara utuh ketika ia berakar pada kesalehan pribadi sekaligus diwujudkan dalam tanggung jawab sosial yang kontekstual. Dengan demikian, iman Kristen tidak berhenti sebagai diskursus moral, tetapi hadir sebagai kesaksian publik yang responsif terhadap ketidakadilan struktural dalam konteks Asia secara umum, dan Indonesia.

Kata kunci: *vital Christianity*; teologi publik; William Wilberforce; perbudakan modern; *global south*.

Abstract

This article reinterprets the concept of vital Christianity in William Wilberforce's thought as a source of reflection for the development of evangelical public theology in the Indonesian context. Through a historical-theological approach and contextual reconstruction, this research demonstrates that evangelical spirituality in Wilberforce's tradition cannot be reduced to personal piety but rather has public implications related to ethical responsibility towards social injustice. In this reconstruction process, vital Christianity is reread in dialogue with contemporary Asian-Indonesian realities, particularly phenomena of modern slavery such as human trafficking, the exploitation of domestic workers, and forced labor. Rather than viewing Wilberforce's model as a directly replicable pattern, this article understands his legacy as a source of theological principles that need to be transformed across different social contexts, including through a critique of global theology as a site of reflection. Through this framework, lived Christian spirituality (vital Christianity) can only be fully understood when rooted in personal piety and embodied in contextual social responsibility. Thus, Christian faith does not cease to be a moral discourse but exists as a public witness responsive to structural injustice in the Asian context in general, and in Indonesia.

Keywords: *vital Christianity*; public theology; William Wilberforce; modern slavery; *global south*.

PENDAHULUAN

Perdagangan budak trans-Atlantik merupakan salah satu bentuk eksploitasi manusia terbesar dalam sejarah modern. Data *Slave Voyages* menunjukkan bahwa antara tahun 1501–1866 sekitar 12,5 juta orang Afrika dipaksa meninggalkan tanah kelahirannya dan lebih dari 10,7 juta tiba sebagai budak di Dunia Baru.¹ Sistem ini membentuk fondasi ekonomi global modern melalui jejaring perdagangan Inggris, khususnya kota pelabuhan seperti Liverpool, yang menghubungkan manufaktur, pelayaran, perbankan, dan perkebunan kolonial dalam satu struktur ekonomi berbasis eksploitasi manusia.² Dalam konteks ini, perbudakan bukan hanya praktik ekonomi, tetapi juga krisis moral dan spiritual.

Di tengah kuatnya kepentingan ekonomi kelompok *West India Interest* yang mempertahankan perdagangan budak,³ muncul gerakan abolisionisme Inggris yang dipelopori oleh William Wilberforce bersama jaringan Evangelikal dan Quaker. Pertobatan Wilberforce pada tahun 1785 menjadi titik penting yang mengubah orientasi hidup dan politiknya. Ia memahami perjuangan melawan perdagangan budak sebagai panggilan iman yang harus diwujudkan dalam ruang publik.⁴ Spiritualitas inilah yang kemudian oleh Murray Andrew Pura disebut sebagai *vital Christianity*, yaitu iman yang hidup, aktif, dan terwujud dalam transformasi sosial.⁵ Bagi Wilberforce, kekristenan tidak berhenti pada kesalehan pribadi, tetapi harus hadir sebagai kekuatan moral yang menentang ketidakadilan struktural.

Dampak historis gerakan ini tidak hanya terlihat pada pengesahan *Abolition of the Slave Trade Act* (1807) dan *Slavery Abolition Act* (1833), tetapi juga pada lahirnya paradigma baru tentang martabat manusia dan tanggung jawab sosial gereja.⁶ Menurut David Brion Davis, abolisionisme menjadi salah satu tonggak perubahan moral modern karena menggeser cara pandang masyarakat dari menerima perbudakan sebagai keniscayaan ekonomi menuju kesadaran bahwa eksploitasi manusia bertentangan dengan prinsip moral universal.⁷ Dalam perkembangan berikutnya, warisan etis ini memengaruhi berbagai gerakan kemanusiaan Kristen

1. "SlaveVoyages," *SlaveVoyages*, diakses 22 September 2025, <https://www.slavevoyages.org/assessment/estimates>.

2. "Archive Sheet 3 – Liverpool and the Transatlantic Slave Trade," *National Museums Liverpool*, diakses 22 September 2025, <https://www.liverpoolmuseums.org.uk/archivesheet3>.

3. Michael Taylor, *The Interest: How the British Establishment Resisted the Abolition of Slavery* (London: Bodley Head, 2020), 54.

4. Stephen Tomkins, *William Wilberforce: The Life of the Great Anti-Slave Trade Campaigner* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 141.

5. Murray Andrew Pura, *Vital Christianity: The Life and Spirituality of William Wilberforce* (Toronto: Clements, 2002), 12.

6. Kevin Belmonte, *William Wilberforce: A Hero for Humanity* (Colorado Springs: NavPress, 2002), 276–77.

7. David Brion Davis, *The Problem of Slavery in the Age of Revolution, 1770–1823* (London: Oxford University Press, 1999), 31.

di dunia, termasuk di Asia, melalui perkembangan misi sosial, advokasi hak asasi manusia, pendidikan, dan perlindungan kelompok rentan.

Relevansi kajian ini semakin nyata dalam konteks Asia dan Indonesia saat ini. *Global Slavery Index 2023* memperkirakan terdapat sekitar 50 juta orang hidup dalam perbudakan modern di seluruh dunia, sementara Indonesia diperkirakan memiliki lebih dari 1,8 juta korban dalam berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan orang dan kerja paksa.⁸ Data Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan ratusan kasus perdagangan orang masih ditangani setiap tahun dengan ribuan korban berhasil diselamatkan.⁹ Pada tahun 2025, lebih dari 500 warga negara Indonesia direpatriasi dari pusat penipuan daring di Myanmar yang melibatkan praktik kerja paksa dan kekerasan fisik.¹⁰ Situasi ini memperlihatkan bahwa praktik perbudakan modern tetap hadir dalam bentuk baru yang lebih kompleks dan transnasional.

Di tengah konteks tersebut, gereja di Asia dan Indonesia menghadapi tantangan untuk membangun bentuk keterlibatan publik yang tidak berhenti pada seruan moral normatif. Karena itu, pembacaan ulang terhadap *vital Christianity* Wilberforce menjadi penting sebagai model teologi publik injili yang mengintegrasikan spiritualitas pribadi, komunitas moral, dan praksis institusional. Penelitian ini berargumen bahwa warisan Wilberforce dapat diterjemahkan secara operasional melalui penguatan etika kerja yang adil, perlindungan pekerja rentan, keterlacakan rantai pasok, serta mekanisme pendampingan dan respons terhadap korban perdagangan manusia dalam konteks gereja, lembaga pendidikan Kristen, organisasi sosial, dan institusi publik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹¹ Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penelusuran, pengkajian, dan interpretasi berbagai sumber tertulis yang relevan dengan pembahasan.

8. "Global Slavery Index," *Walk Free*, diakses 8 November 2025, <https://www.walkfree.org/global-slavery-index/>.

9. "Capaian Kerja Satgas TPPO Polri, 1.794 Korban Diselamatkan," *detikNews*, diakses 7 November 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7711295/capaian-kerja-satgas-tpo-polri-1-794-korban-diselamatkan>.

10. "Indonesia Akan Memeriksa Lebih dari 500 Warga Negara yang Dibebaskan dari Pusat Penipuan Myanmar," *Reuters*, 18 Maret 2025, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-question-more-than-500-citizens-freed-myanmar-scam-centres-2025-03-18/>.

11. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 12.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa karya-karya William Wilberforce, khususnya *A Practical View of the Prevailing Religious System of Professed Christians dan Real Christianity*, yang memuat pemikiran mengenai *vital Christianity*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, serta berbagai literatur yang membahas teologi publik, abolisionisme, teologi Global South, migrasi, dan perbudakan modern.

Berdasarkan sumber data tersebut, penelitian ini dilakukan melalui dua tahap utama. Pertama, analisis historis-teologis terhadap pemikiran William Wilberforce, khususnya konsep *vital Christianity*, untuk memahami hubungan antara iman, etika, dan keterlibatan sosialnya dalam konteks gerakan abolisionisme Inggris abad ke-18–19. Kedua, rekonstruksi teologis-kontekstual dengan mendialogkan konsep tersebut dengan realitas Asia–Indonesia masa kini, khususnya isu perbudakan modern dan eksploitasi tenaga kerja. Melalui pendekatan ini, penelitian bergerak dari kajian historis menuju refleksi teologis yang relevan bagi praksis gereja dalam merespons ketidakadilan sosial kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep *vital Christianity*, praksis publik William Wilberforce, perkembangan teologi publik, serta konteks perbudakan modern di Asia dan Indonesia. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis deskriptif-interpretatif yang meliputi tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.¹²

PEMBAHASAN

William Wilberforce: Spiritualitas dan Praksis Publik

Konsep *vital Christianity* merupakan fondasi spiritual yang mendasari teologi publik William Wilberforce. Konsep ini merujuk pada iman Kristen yang hidup, yang tidak berhenti pada praktik ritual atau identitas nominal, tetapi menghasilkan transformasi karakter dan keterlibatan sosial yang nyata. Bagi Wilberforce, iman harus diwujudkan dalam tindakan yang berdampak bagi kehidupan pribadi maupun masyarakat. Karena itu, ia mengkritik nominal *Christianity*, yaitu kekristenan yang hanya menampilkan bentuk keagamaan lahiriah tanpa memiliki daya moral untuk mengubah individu dan struktur sosial.¹³ Dengan demikian, *vital Christianity* berakar pada pengalaman pertobatan yang menghasilkan disposisi etis baru, yang merupakan suatu pembaruan hati yang secara inheren bersifat publik.

12. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 13.

13. William Wilberforce, *A Practical View of the Prevailing Religious System of Professed Christians: In the Higher and Middle Classes in This Country, Contrasted with Real Christianity* (London: T. Cadell, 1797), 41–45.

Secara teologis, konsep ini tidak dapat dipisahkan dari doktrin *imago Dei* dan karya penebusan Kristus. Jika manusia adalah gambar Allah, maka setiap bentuk eksploitasi terhadap manusia merupakan pelanggaran terhadap tatanan ciptaan itu sendiri. Dalam perspektif ini, dosa tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran individual, tetapi juga sebagai realitas struktural yang termanifestasi dalam sistem ekonomi, politik, dan sosial yang tidak adil. Oleh karena itu, *vital Christianity* menolak reduksi iman menjadi ranah privat, dan sebaliknya menuntut keterlibatan aktif dalam transformasi struktur yang melanggengkan ketidakadilan.¹⁴ Dengan demikian, iman yang hidup selalu memiliki implikasi sosial yang tidak terelakkan.

Dalam tradisi evangelikal, dimensi publik iman ini terartikulasikan melalui apa yang oleh David Bebbington disebut sebagai *activism*, yakni dorongan inheren dalam iman untuk diwujudkan dalam tindakan nyata bagi masyarakat.¹⁵ Namun, jika dibaca secara kritis, *activism* dalam kerangka *vital Christianity* bukan sekadar aktivisme sosial, melainkan ekspresi dari spiritualitas yang berakar pada relasi dengan Allah. Di sinilah letak perbedaannya dengan sekadar etika sosial sekuler: tindakan publik bukan tujuan akhir, melainkan buah dari transformasi batin yang dikerjakan oleh Injil. Oleh karenanya, praksis sosial dalam *vital Christianity* tidak dapat dipisahkan dari formasi spiritual yang mendasarinya.

Perspektif ini diperluas oleh Stanley Hauerwas melalui gagasannya tentang gereja sebagai *community of character*, yaitu komunitas yang tidak hanya mengajarkan nilai moral, tetapi mewujudkan alternatif kehidupan yang berbeda dari logika dunia.¹⁶ Dalam kerangka ini, gereja bukan sekadar agen perubahan sosial eksternal, melainkan ruang di mana etika Kerajaan Allah dihidupi secara konkret. Dengan demikian, *vital Christianity* tidak hanya bersifat individual, tetapi komunal—membentuk habitus moral yang kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi sosial tidak dapat dilepaskan dari pembentukan komunitas yang menghidupi iman secara nyata.

Selanjutnya, konsep *moral capital* yang dikembangkan oleh Christopher Leslie Brown membantu menjelaskan bagaimana komunitas religius dapat menghasilkan legitimasi moral di ruang publik.¹⁷ Dalam kasus abolisionisme, kekuatan gerakan tidak hanya terletak pada argumen rasional, tetapi pada kredibilitas moral komunitas yang menghidupi nilai-nilai yang mereka perjuangkan. Namun, analisis ini juga membuka ruang kritik: ketika *moral capital* dibangun

14. John Coffey, *Exodus and Liberation: Deliverance Politics from John Calvin to Martin Luther King Jr.* (Oxford: Oxford University Press, 2014), 214.

15. David W. Bebbington, *Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the 1980s* (London: Unwin Hyman, 1989), 3–4.

16. Stanley Hauerwas, *A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981), 78.

17. Christopher Leslie Brown, *Moral Capital: Foundations of British Abolitionism* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2006), 452.

tanpa partisipasi kelompok tertindas, ia berisiko menjadi paternalistik dan elitis. Oleh karena itu, legitimasi moral harus selalu diuji dalam relasinya dengan keadilan dan partisipasi.

Dengan demikian, *vital Christianity* dapat dipahami sebagai bentuk teologi publik injili yang bersifat integratif: ia menghubungkan spiritualitas pribadi, pembentukan komunitas moral, dan transformasi struktur sosial. Namun, kekuatannya terletak justru pada ketegangan yang dihasilkannya, antara iman dan politik, antara kesalehan dan keadilan, serta antara komitmen moral dan kompleksitas realitas sosial. Dalam ketegangan inilah, *vital Christianity* berfungsi bukan hanya sebagai konsep spiritual, tetapi sebagai kerangka teologis yang menuntut pertobatan yang bersifat personal sekaligus struktural. Dalam kerangka ini, *vital Christianity* membuka kemungkinan bagi pembacaan iman Kristen sebagai praksis publik yang mampu merespons bentuk-bentuk ketidakadilan modern yang bersifat struktural.

Spiritualitas William Wilberforce tidak dapat dipahami hanya sebagai pengalaman religius privat, melainkan sebagai titik balik epistemologis yang mengubah cara ia membaca realitas sosial dan politik. Spiritualitas William Wilberforce berakar pada gerakan *Evangelical Revival* (Kebangkitan Injili) yang berkembang dalam Gereja Anglikan pada abad ke-18. Gerakan ini menekankan pentingnya pertobatan pribadi, kehidupan yang saleh, serta keterlibatan aktif dalam menjalankan iman Kristen di tengah masyarakat. Pembentukan spiritual Wilberforce dipengaruhi oleh sejumlah tokoh Evangelikal terkemuka pada masanya, seperti John Newton, Henry Thornton, dan John Venn, yang merupakan bagian dari jaringan Evangelikal Anglikan.¹⁸ Melalui bimbingan dan pemikiran para tokoh tersebut, Wilberforce semakin meyakini bahwa panggilan Kristen tidak terbatas pada kehidupan pribadi, tetapi juga harus diwujudkan dalam pelayanan publik intensifikasi kesalehan pribadi, tetapi menghasilkan reposisi radikal atas identitas dan panggilannya: politik tidak lagi dipahami sebagai arena kekuasaan, melainkan sebagai ruang ketaatan kepada Allah.¹⁹ Dalam pengertian ini, spiritualitas Wilberforce bersifat intrinsik-politik, bukan karena ia “membawa agama ke politik,” tetapi karena iman itu sendiri memiliki implikasi publik yang tak terelakkan. Di sini terlihat bahwa bagi Wilberforce, iman tidak berada di pinggiran kehidupan publik, melainkan menjadi kerangka utama dalam menafsirkan dan mengarahkan tindakan politik.

Kritiknya terhadap *nominal Christianity* harus dibaca sebagai kritik teologis terhadap kegagalan gereja dalam membentuk imajinasi moral publik. Bagi Wilberforce, agama yang berhenti pada formalitas liturgis justru berfungsi sebagai legitimasi pasif bagi ketidakadilan struktural.²⁰ Dengan kata lain, *nominal Christianity* bukan netral, tetapi secara implisit berkolusi

18. Stephen Tomkins, *The Clapham Sect: How Wilberforce's Circle Transformed Britain* (Chicago: Lion Hudson, 2012), 25.

19. William Wilberforce, *Real Christianity: A Practical View of the Prevailing Religious System of Professed Christians* (London: Hatchard, 1797), 45.

20. Wilberforce, *A Practical View of the Prevailing Religious System*, 41.

dengan sistem yang menindas. Di sinilah letak radikalitas *vital Christianity*: ia tidak hanya menawarkan kesalehan alternatif, tetapi mendekonstruksi bentuk religiositas yang kehilangan daya profetisnya. Oleh karena itu, kritik Wilberforce tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politis yang kuat.

Komitmen Wilberforce terhadap *reformation of manners* sering kali dipahami secara keliru sebagai upaya yang hanya berfokus pada pembinaan moralitas individu. Padahal, secara teologis konsep ini mencerminkan visi yang lebih luas mengenai transformasi masyarakat yang berakar pada pembaruan hati manusia. Wilberforce meyakini bahwa berbagai bentuk ketidakadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari kemerosotan moral yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan pada tingkat struktur dan institusi sosial harus berjalan beriringan dengan pembaruan moral dan spiritual individu. Dalam pandangannya, reformasi sosial yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila didukung oleh karakter dan nilai-nilai moral yang diperbarui melalui iman Kristen. Kevin Belmonte menyebut kerangka ini sebagai kritik profetis terhadap iman yang mati, karena hanya iman yang vital mampu menopang bangsa menghadapi dekadensi moral.²¹ Pendekatan ini menunjukkan suatu sintesis penting antara etika kebajikan (*virtue ethics*) dan perubahan institusional: perubahan hukum tanpa perubahan karakter akan rapuh, tetapi moralitas tanpa intervensi struktural akan mandul. Pendekatan ini menegaskan bahwa praksis publik Wilberforce berakar pada formasi moral yang mendalam, bukan sekadar strategi politik pragmatis.

Integrasi antara devosi pribadi dan praksis publik menjadi kunci dalam memahami konsistensi etis Wilberforce. Praktik spiritual seperti doa dan pembacaan Kitab Suci bukan sekadar disiplin privat, tetapi membentuk apa yang dapat disebut sebagai “imajinasi teologis” kemampuan untuk melihat realitas politik dalam terang kehendak Allah.²² Spiritualitas berfungsi sebagai sumber ketahanan moral (*moral resilience*) yang memungkinkan Wilberforce bertahan menghadapi kegagalan berulang, penolakan parlemen, serta resistensi dari kelompok-kelompok yang diuntungkan oleh sistem perbudakan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Wilberforce mengabaikan strategi politik atau menempatkan spiritualitas secara terpisah dari tindakan sosial. Sebaliknya, spiritualitas menjadi landasan yang membentuk cara ia menjalankan strategi perubahan sosial secara bertahap (*incremental*) dan kolaboratif. Wilberforce menyadari bahwa penghapusan perdagangan budak tidak dapat dicapai melalui konfrontasi sesaat, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan pembangunan koalisi, pengumpulan bukti, kampanye publik, serta kerja sama dengan berbagai aktor dalam dan luar parlemen.

21. Belmonte, *William Wilberforce*, 89.

22. William Wilberforce, *Real Christianity: A Practical View of the Prevailing Religious System of Professed Christians* (London: Hatchard, 1797), 45.

Brown menjelaskan bahwa keberhasilan gerakan abolisionis tidak hanya bertumpu pada keyakinan moral dan teologis, tetapi juga pada kemampuan menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan politik yang terorganisasi. Komite yang melibatkan kaum Quaker dan sejumlah tokoh yang kemudian terkait dengan Clapham Sect tersebut berhasil mengintegrasikan riset empiris, advokasi publik, dan lobi politik dalam sebuah kampanye nasional yang sistematis. Dengan demikian, perjuangan abolisionis menunjukkan bahwa transformasi sosial yang diperjuangkan Wilberforce dan rekan-rekannya tidak hanya didorong oleh idealisme religius, tetapi juga oleh penggunaan bukti empiris dan strategi organisasi yang efektif.²³

Dalam praksis politiknya, Wilberforce mengembangkan pendekatan yang bersifat inkremental (bertahap) dan kolaboratif. Strategi ini sering dikritik sebagai kompromistis, namun secara lebih mendalam dapat dibaca sebagai bentuk realisme teologis seperti kesadaran bahwa transformasi struktural terjadi dalam sejarah yang kompleks dan tidak ideal.²⁴ Peran *Clapham Sect* dalam kerangka ini tidak hanya dapat dipahami sebagai jaringan sosial keagamaan, melainkan sebagai komunitas moral-intelektual yang membangun visi etis bersama bagi transformasi publik. Dalam konteks ini, perjuangan melawan perbudakan tidak diposisikan semata sebagai agenda kemanusiaan, tetapi juga sebagai ekspresi iman Kristen yang diwujudkan melalui tanggung jawab sosial dan reformasi moral masyarakat. Meskipun demikian, kekuatan moral gerakan ini tetap mengandung ambivalensi historis yang perlu dibaca secara kritis.

Sebagian besar anggota *Clapham Sect* berasal dari kalangan elite terdidik dan memiliki akses terhadap ruang politik serta ekonomi Inggris pada masanya. Akibatnya, gerakan abolisionisme yang mereka bangun masih didominasi oleh perspektif paternalistik, sehingga suara dan pengalaman para budak belum sepenuhnya hadir sebagai subjek utama dalam proses perjuangan tersebut. Dengan demikian, keberhasilan moral abolisionisme tidak dapat dipahami secara romantis atau ahistoris, melainkan perlu dianalisis dalam kerangka relasi kuasa, representasi sosial, dan keterbatasan konteks zamannya. Ketegangan ini justru memperlihatkan bahwa gerakan moral yang transformatif sekalipun tetap memerlukan evaluasi kritis agar tidak mereproduksi bentuk-bentuk dominasi baru di balik agenda pembebasan yang diperjuangkan.

Dengan demikian, spiritualitas dan praksis publik Wilberforce tidak dapat direduksi menjadi model sederhana “iman menghasilkan tindakan.” Sebaliknya, ia memperlihatkan dialektika yang lebih kompleks: iman membentuk visi moral, visi tersebut diterjemahkan dalam strategi politik, dan strategi itu sendiri terus diuji oleh realitas historis yang penuh kompromi. Dalam ketegangan inilah, *vital Christianity* hadir bukan sebagai idealisme abstrak, tetapi sebagai

23. Brown, *Moral Capital*, 359, 443.

24. Seymour Drescher, *Abolition: A History of Slavery and Antislavery* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 422.

praksis iman yang bergulat secara konkret dengan dunia, sebuah model teologi publik yang sekaligus inspiratif dan tetap perlu dikritisi dalam konteks yang berbeda.

Evaluasi Kritis

Meskipun William Wilberforce dipandang sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah abolisionisme modern, pembacaan kritis menunjukkan bahwa gerakan yang dipimpinnya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan epistemologis Kekaisaran Inggris. Stephen Tomkins menunjukkan bahwa *Clapham Sect* sebagai jaringan utama pendukung Wilberforce didominasi oleh kelompok elite religius dan kelas menengah-atas Inggris yang memiliki akses terhadap parlemen, pendidikan, dan struktur ekonomi imperial.²⁵ Karena itu, sekalipun gerakan abolisionisme berhasil menghadirkan transformasi moral yang besar, ia tetap bergerak dalam pola representasi yang paternalistik: para budak dibela, tetapi jarang hadir sebagai subjek yang membentuk refleksi moral dan teologis gerakan tersebut.

Kritik ini menjadi semakin penting ketika dibaca melalui perspektif teologi Global South, khususnya Asia. Dalam konteks Asia yang dibentuk oleh kolonialisme, kemiskinan struktural, migrasi tenaga kerja, dan relasi kuasa global yang tidak seimbang, persoalan teologi publik tidak hanya berkaitan dengan keberanian moral gereja berbicara tentang keadilan, tetapi juga mengenai posisi dari mana gereja berbicara. Kritik pascakolonial terhadap Wilberforce juga perlu dibaca dalam kaitannya dengan hubungan antara kekristenan dan kolonialisme. Robin Blackburn menunjukkan bahwa penghapusan perdagangan budak tidak otomatis mengakhiri logika eksploitasi kolonial Inggris.²⁶ Dalam banyak kasus, kolonialisme tetap mempertahankan bentuk subordinasi ekonomi dan rasial yang baru. Karena itu, pembacaan terhadap Wilberforce harus disertai kesadaran bahwa proyek moral Kristen tidak pernah sepenuhnya netral dari relasi kuasa imperial.

Kritik terhadap model kekristenan publik yang terlalu berpusat pada elite moral menjadi penting dalam konteks ini. Wilberforce memang berhasil menghadirkan kesadaran moral Kristen dalam ruang publik Inggris, tetapi pendekatan tersebut tetap bergerak terutama dari pusat kekuasaan politik dan sosial. Dalam konteks Asia, pola demikian menjadi problematis karena banyak masyarakat justru mengalami sejarah kolonialisme, subordinasi ekonomi, dan marginalisasi sosial yang panjang. Karena itu, rekonstruksi *vital Christianity* perlu bergerak dari model moral reform menuju spiritualitas publik yang partisipatoris, kontekstual, dan berakar pada pengalaman mereka yang hidup di bawah struktur ketidakadilan.

Perspektif ini tampak kuat dalam perkembangan teologi migrasi Asia kontemporer. Peter C. Phan menegaskan bahwa migrasi bukan sekadar fenomena sosial, melainkan locus teologis

25. Tomkins, *William Wilberforce*, 264.

26. Robin Blackburn, *The Overthrow of Colonial Slavery: 1776–1848* (London: Verso, 2011), 380.

yang membentuk cara gereja memahami dirinya sendiri.²⁷ Dalam *Deus Migrator*, Phan menunjukkan bahwa kekristenan sejak awal merupakan agama yang lahir melalui pengalaman perpindahan, diaspora, dan keterasingan. Karena itu, gereja tidak dapat memahami dirinya sebagai institusi mapan yang berdiri di atas penderitaan migran, tetapi sebagai komunitas peziarah yang dipanggil berjalan bersama mereka yang tercerabut dari tanah, identitas, dan keamanan sosialnya. Perspektif ini penting bagi Asia, sebab jutaan pekerja migran Asia hidup dalam kerentanan struktural akibat sistem ekonomi global yang mengeksploitasi tenaga kerja murah.

Dalam konteks tersebut, *vital Christianity* tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai integrasi antara iman pribadi dan tanggung jawab moral individual sebagaimana tampak dalam tradisi Evangelikal Inggris. Spiritualitas Kristen justru diuji melalui kemampuan gereja menghadirkan solidaritas konkret terhadap tubuh-tubuh rentan yang dipinggirkan oleh sistem ekonomi global. Gereja dipanggil menjadi ruang hospitalitas yang menghadirkan perlindungan sosial, pendampingan pastoral, dan keberpihakan profetis terhadap mereka yang tereksplorasi. Dengan demikian, iman Kristen tidak berhenti pada kesalehan privat, tetapi menjadi praksis publik yang menghadirkan martabat manusia sebagai gambar Allah.

Pemikiran serupa dikembangkan oleh Muthuraj Swamy dalam refleksinya mengenai teologi migrasi dan krisis pengungsi Asia. Swamy menegaskan bahwa teologi tidak dapat lagi dibangun dari jarak aman terhadap penderitaan sosial.²⁸ Pengalaman migrasi harus menjadi pusat refleksi teologis karena di sanalah gereja berjumpa dengan realitas ketidakadilan global secara paling nyata. Dalam kerangka ini, gereja dipanggil bukan hanya memberi bantuan karitatif, tetapi membangun keterlibatan publik yang aktif terhadap kebijakan migrasi, perlindungan pengungsi, dan keadilan ekonomi. Kritik Swamy penting karena banyak gereja Asia masih terjebak dalam pelayanan amal yang tidak menyentuh akar struktural ketidakadilan.

Selain migrasi, ketidakadilan Asia juga berkaitan erat dengan warisan kolonialisme dan relasi kuasa global yang terus berlangsung dalam bentuk baru. Andreas Kristianto, melalui pembacaannya terhadap teologi Kwok Pui-lan, menunjukkan bahwa Asia mengalami apa yang disebut sebagai “imajinasi postkolonial,” yaitu dominasi epistemologi Barat terhadap identitas, budaya, dan refleksi keagamaan masyarakat Asia.²⁹ Karena itu, teologi Asia tidak dapat sekadar mereproduksi paradigma Barat mengenai gereja dan masyarakat. Teologi harus lahir dari

27. Peter C. Phan, “Deus Migrator—God the Migrant: Migration of Theology and Theology of Migration,” *Theological Studies* 77, no. 4 (2016): 845–68.

28. Muthuraj Swamy, “Refugee Migration Today: Challenges for Doing Theology,” *Theology* 120, no. 5 (2017): 334–46.

29. Andreas Kristianto, “Teologi Keagamaan Kwok Pui-Lan: Dari Hermeneutika Asia Menuju Keadilan Gender (Sebuah Peta Pemikiran Teologi Kontekstual Asia),” *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 8, no. 2 (2022), 12.

pengalaman konkret masyarakat Asia yang mengalami kemiskinan, subordinasi gender, diskriminasi agama, dan marginalisasi sosial.

Dalam terang pemikiran Kwok Pui-lan, rekonstruksi *vital Christianity* perlu bergerak dari pola universalistik menuju hermeneutika yang dialogis dan pascakolonial. Gereja tidak cukup berbicara mengenai keadilan dari pusat kekuasaan moral, tetapi harus belajar mendengar pengalaman komunitas yang terluka. Perspektif ini sangat penting karena sejarah kekristenan Asia sering kali beririsan dengan kolonialisme Barat, sehingga gereja berisiko kehilangan kredibilitas publik ketika berbicara tentang pembebasan tanpa terlebih dahulu mengkritisi relasi kuasa dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, *vital Christianity* perlu direkonstruksi sebagai spiritualitas yang rendah hati, dialogis, dan terbuka terhadap suara dari pinggiran.

Konteks Asia kontemporer juga memperlihatkan bahwa ketidakadilan tidak lagi hanya diproduksi melalui kekerasan fisik atau kolonialisme klasik, tetapi juga melalui budaya populer, media digital, dan politik identitas. Yahya Wijaya menunjukkan bahwa teologi publik Indonesia harus mampu berdialog dengan budaya populer sebagai ruang pembentukan etika sosial masyarakat modern.³⁰ Ruang publik digital kini menjadi arena produksi disinformasi, ujaran kebencian, eksploitasi identitas agama, dan manipulasi sosial yang memperdalam polarisasi masyarakat. Dalam konteks ini, gereja tidak dapat membatasi dirinya pada ruang liturgis internal, tetapi harus hadir secara etis dalam budaya digital.

Karena itu, *vital Christianity* abad ke-21 perlu dipahami sebagai spiritualitas publik digital. Kesaksian Kristen tidak lagi hanya tampak dalam keberanian moral di parlemen atau ruang politik formal, tetapi juga dalam praktik komunikasi sehari-hari, penggunaan media sosial, dan pembentukan budaya dialog yang menghargai martabat manusia. Gereja dipanggil menjadi komunitas yang melawan dehumanisasi digital melalui etika komunikasi yang menghadirkan kebenaran, solidaritas, dan penghormatan terhadap sesama. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengadopsi abolisionisme Wilberforce sebagai model historis normatif. Yang direkonstruksi adalah prinsip teologis dari *vital Christianity*, yaitu keyakinan bahwa iman Kristen tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab publik terhadap ketidakadilan.

Melalui dialog dengan teologi Asia dan Global South, konsep tersebut ditransformasikan menjadi bentuk teologi publik yang lebih partisipatoris, kontekstual, dan peka terhadap relasi kuasa. Dalam kerangka ini, gereja tidak hanya dipanggil berbicara bagi mereka yang tertindas, tetapi berjalan bersama mereka dan membiarkan pengalaman mereka membentuk praksis iman gereja itu sendiri.

30. Yahya Wijaya, "Negotiating Popular Culture and Public Theology in the Indonesian Context," *International Journal of Public Theology* (2024): 139.

Relevansi bagi Gereja di Indonesia

Rekonstruksi *vital Christianity* dalam perspektif Asia menemukan relevansinya dalam realitas sosial kawasan ini yang ditandai oleh migrasi tenaga kerja, perdagangan manusia, eksploitasi ekonomi, dan ketimpangan sosial yang terus berlangsung. Asia menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap perbudakan modern, terutama melalui kerja paksa, eksploitasi pekerja migran, dan perdagangan manusia lintas negara. Dalam konteks demikian, gereja-gereja Asia menghadapi pertanyaan mendasar: bagaimana iman Kristen dapat hadir secara publik tanpa jatuh pada pola moralistik, paternalistik, atau sekadar reproduksi model Barat?

Dalam konteks Indonesia, persoalan ketidakadilan tampak sangat nyata dalam fenomena migrasi tenaga kerja dan perdagangan manusia. Banyak pekerja migran Indonesia berasal dari kelompok miskin dengan akses pendidikan dan perlindungan hukum yang terbatas. Situasi ini menunjukkan bahwa eksploitasi modern tidak hanya lahir dari tindakan kriminal individual, tetapi dari struktur ekonomi dan sosial yang mempertahankan ketimpangan. Dalam konteks demikian, gereja dipanggil bukan hanya menjadi penghibur spiritual, tetapi komunitas yang menghadirkan keberpihakan nyata terhadap kelompok rentan.

Lamria Sinaga menegaskan bahwa gereja perlu mengembangkan eklesiologi komunal dalam merespons realitas migrasi.³¹ Gereja tidak boleh memahami migran sebagai objek pelayanan semata, melainkan sebagai subjek pembentuk kehidupan gerejawi itu sendiri. Perspektif ini penting karena banyak pendekatan pastoral terhadap migran masih bersifat paternalistik. Dalam kerangka *vital Christianity*, gereja dipanggil membangun komunitas yang memungkinkan para migran berpartisipasi dalam pembentukan identitas dan praksis gerejawi.

Perspektif tersebut diperdalam oleh Raymundus Sudhiarsa yang menekankan pentingnya spiritualitas interkultural dalam konteks migrasi Indonesia.³² Menurut Sudhiarsa, migrasi tidak hanya menghadirkan persoalan ekonomi, tetapi juga krisis identitas, konflik budaya, dan ketegangan antaragama. Karena itu, gereja harus membangun spiritualitas yang mampu menciptakan jembatan sosial di tengah masyarakat multikultural. Dalam konteks Indonesia yang plural, *vital Christianity* tidak dapat diwujudkan melalui eksklusivisme religius, melainkan melalui praksis dialog, hospitalitas, dan solidaritas lintas komunitas.

Konteks Indonesia juga menunjukkan bahwa persoalan migrasi memiliki dimensi gender yang sangat kuat. Banyak pekerja migran perempuan mengalami kekerasan, eksploitasi seksual, dan pelanggaran hak asasi manusia. Benediktus Denar dan Jean Loustar Jewadut menunjukkan bahwa gereja perlu menghadirkan respons teologi publik yang tidak berhenti pada seruan moral,

31. Lamria Sinaga, "Communal Ecclesiology: The Church Responds to the Reality of Migration in Batak Context," *Quaerens: Journal of Theology and Christianity Studies* 5, no. 1 (2023), 3.

32. Raymundus Sudhiarsa, "Christian Migrants and Their Living Faith in Mission: An Indonesian Perspective," *Transformation* 40, no. 2 (2023): 119–30, 127–8.

tetapi bergerak menuju advokasi konkret dan pemberdayaan perempuan migran.³³ Kritik ini penting karena gereja sering kali lebih nyaman berbicara mengenai moralitas keluarga dibanding memperjuangkan struktur sosial yang menyebabkan perempuan rentan terhadap eksploitasi ekonomi.

Dengan demikian, rekonstruksi *vital Christianity* dalam konteks Indonesia harus bergerak dari spiritualitas individual menuju spiritualitas transformatif yang membentuk praksis komunitas. Gereja dipanggil menghadirkan keadilan tidak hanya melalui khotbah, tetapi melalui habitus institusional yang adil: perlindungan terhadap pekerja gereja, keberpihakan terhadap migran, pendidikan jemaat mengenai perdagangan manusia, serta kerja sama dengan masyarakat sipil dan komunitas lintas agama. Dalam kerangka ini, gereja bukan sekadar agen moral yang berbicara dari atas, tetapi tubuh Kristus yang berjalan bersama mereka yang terluka oleh sistem ketidakadilan.

Akhirnya, relevansi *vital Christianity* bagi Asia dan Indonesia tidak terletak pada reproduksi model abolisionisme Evangelikal Inggris secara langsung, melainkan pada rekonstruksi prinsip teologisnya: bahwa iman Kristen tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab publik terhadap penderitaan manusia. Namun dalam konteks pascakolonial Asia, tanggung jawab tersebut harus diwujudkan secara partisipatoris, dialogis, dan kontekstual. Gereja dipanggil bukan hanya berbicara bagi mereka yang tertindas, tetapi membiarkan pengalaman mereka membentuk cara gereja memahami Injil, komunitas, dan kehadiran Allah di tengah dunia. Dalam konteks Indonesia, operasionalisasi *vital Christianity* dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk praksis konkret.

Pertama, pada tingkat liturgis dan pastoral, gereja dapat mengembangkan pendidikan jemaat mengenai perdagangan manusia, migrasi tenaga kerja, dan etika kerja Kristen, sekaligus menyediakan pendampingan pastoral bagi korban eksploitasi. Kedua, pada tingkat institusional, gereja dapat menerapkan prinsip keadilan kerja dalam pengelolaan tenaga kerja internal, penggunaan kontrak yang adil, serta evaluasi etis terhadap rantai pasok dan konsumsi institusi gereja. Ketiga, pada tingkat publik, gereja dapat bekerja sama dengan lembaga *parachurch*, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lintas agama dalam advokasi, pendidikan publik, dan perlindungan korban perdagangan manusia

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa *vital Christianity* dalam pemikiran William Wilberforce tidak dapat dipahami sekadar sebagai kesalehan personal, melainkan sebagai spiritualitas publik

33. Benediktus Denar dan Jean Loustar Jewadut, "Respons Gereja Terhadap Persoalan Feminisasi Migrasi Dalam Perspektif Teologi Publik," *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural* 12, no. 1 (2023), 14–15.

yang menghubungkan iman Kristen dengan tanggung jawab sosial terhadap ketidakadilan. Dalam konteks Inggris abad ke-18, spiritualitas ini memberikan dorongan moral yang signifikan bagi gerakan abolisionisme dan memperlihatkan bahwa iman Kristen dapat berperan dalam transformasi sosial. Namun demikian, pembacaan kritis melalui perspektif teologi Asia dan Global South memperlihatkan bahwa praksis Wilberforce tetap dibatasi oleh konteks imperial Inggris, termasuk kecenderungan paternalistik dan elitisme moral. Karena itu, warisan Wilberforce tidak dapat diterapkan secara langsung sebagai model normatif bagi konteks Asia kontemporer yang memiliki pengalaman kolonial, ketimpangan sosial, dan dinamika budaya yang berbeda.

Penelitian ini, karena itu, merekonstruksi prinsip teologis dari *vital Christianity* melalui dialog dengan teologi publik dan teologi migrasi Asia. Dalam konteks Asia masa kini, ketidakadilan tidak lagi hadir terutama dalam bentuk perbudakan klasik, melainkan melalui perdagangan manusia, eksploitasi pekerja migran, dan ketimpangan ekonomi global. Peter C. Phan menegaskan bahwa migrasi merupakan *locus* teologis yang memperlihatkan kehadiran Allah bersama mereka yang tercerabut dari keamanan sosial dan martabatnya.³⁴ Dengan demikian, gereja dipanggil bukan hanya menyampaikan seruan moral terhadap ketidakadilan, tetapi menghadirkan solidaritas konkret terhadap kelompok rentan melalui hospitalitas, pendampingan, dan keberpihakan sosial.

Relevansi rekonstruksi ini tampak secara khusus dalam konteks Indonesia. Praktik perdagangan manusia, eksploitasi pekerja migran, dan relasi kerja yang tidak adil menunjukkan bahwa persoalan martabat manusia tetap menjadi pergumulan nyata gereja di ruang publik. Lamria Sinaga menegaskan bahwa gereja perlu membangun eklesiologi komunal yang melihat migran bukan sekadar objek pelayanan, melainkan subjek yang ikut membentuk kehidupan gerejawi.³⁵ Karena itu, *vital Christianity* di Indonesia perlu diwujudkan melalui pembentukan komunitas gereja yang partisipatoris, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta keterlibatan publik yang lebih transformatif dan kontekstual.

Selain itu, perkembangan budaya digital dan media sosial di Asia menghadirkan tantangan baru bagi kesaksian gereja. Yahya Wijaya menunjukkan bahwa ruang publik masyarakat Asia kini semakin dibentuk oleh budaya populer dan komunikasi digital yang memengaruhi cara masyarakat memahami identitas, agama, dan moralitas.³⁶ Dalam konteks ini, *vital Christianity* tidak cukup diwujudkan melalui aktivitas gereja di ruang liturgis, tetapi juga

34. Phan, "Deus Migrator—God the Migrant: Migration of Theology and Theology of Migration," 857.

35. Sinaga, "Communal Ecclesiology: The Church Responds to the Reality of Migration in Batak Context," 14.

36. Wijaya, "Negotiating Popular Culture and Public Theology in the Indonesian Context," 142.

melalui etika komunikasi publik yang melawan ujaran kebencian, manipulasi identitas agama, dan dehumanisasi sosial di ruang digital.

Dalam bentuk operasional, penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi *vital Christianity* dapat diwujudkan melalui pembentukan budaya gerejawi yang lebih partisipatoris dan etis, termasuk pendidikan jemaat mengenai perdagangan manusia dan keadilan kerja, penerapan relasi kerja yang adil di lingkungan gereja, pengembangan kesadaran etis terhadap rantai pasok dan konsumsi, serta kerja sama dengan lembaga *parachurch* dan masyarakat sipil dalam pendampingan korban dan advokasi publik. Dengan demikian, gereja tidak hanya berbicara mengenai keadilan sebagai konsep moral, tetapi menghadirkannya dalam habitus institusional dan kehidupan sehari-hari komunitas iman.

Akhirnya, kajian ini menegaskan bahwa *vital Christianity* hanya memiliki relevansi teologis apabila diwujudkan dalam praksis yang konkret dan kontekstual. Gereja dipanggil bukan mereplikasi model abolisionisme Barat secara ahistoris, melainkan membangun bentuk teologi publik yang lahir dari pengalaman masyarakat Asia sendiri. Dengan demikian, iman Kristen yang hidup tidak berhenti pada keyakinan spiritual individual, tetapi menjadi kesaksian publik yang menghadirkan martabat, keadilan, solidaritas, dan pemulihan di tengah berbagai bentuk eksploitasi modern.

REFERENSI

- Bebbington, David W. *Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the 1980s*. London: Unwin Hyman, 1989.
- Belmonte, Kevin. *William Wilberforce: A Hero for Humanity*. Colorado Springs: NavPress, 2002.
- Blackburn, Robin. *The Overthrow of Colonial Slavery: 1776–1848*. London: Verso, 2011.
- Brown, Christopher Leslie. *Moral Capital: Foundations of British Abolitionism*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2006.
- Coffey, John. *Exodus and Liberation: Deliverance Politics from John Calvin to Martin Luther King Jr.* Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Davis, David Brion. *The Problem of Slavery in the Age of Revolution, 1770–1823*. London: Oxford University Press, 1999.
- Denar, Benediktus, dan Jean Loustar Jewadut. “Respons Gereja Terhadap Persoalan Feminisasi Migrasi Dalam Perspektif Teologi Publik.” *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural* 12, no. 1 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.60130/ja.v12i01.113>.
- Drescher, Seymour. *Abolition: A History of Slavery and Antislavery*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Kristianto, Andreas. “Teologi Keagamaan Kwok Pui-Lan: Dari Hermeneutika Asia Menuju Keadilan Gender (Sebuah Peta Pemikiran Teologi Kontekstual Asia).” *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 8, no. 2 (2022): 1–22. <https://doi.org/10.37196/kenosis.v8i2.499>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- National Museums Liverpool. “Archive Sheet 3 – Liverpool and the Transatlantic Slave Trade.” Diakses 22 September 2025. <https://www.liverpoolmuseums.org.uk/archivesheet3>.
- Phan, Peter C. “Deus Migrator—God the Migrant: Migration of Theology and Theology of Migration.” *Theological Studies* 77, no. 4 (2016): 845–868. <https://doi.org/10.1177/0040563916666825>.
- Pura, Murray Andrew. *Vital Christianity: The Life and Spirituality of William Wilberforce*. Toronto:

- Clements, 2002.
- Reuters. "Indonesia Akan Memeriksa Lebih dari 500 Warga Negara yang Dibebaskan dari Pusat Penipuan Myanmar." 18 Maret 2025. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-question-more-than-500-citizens-freed-myanmar-scam-centres-2025-03-18/>.
- Sinaga, Lamria. "Communal Ecclesiology: The Church Responds to the Reality of Migration in Batak Context." *Quaerens: Journal of Theology and Christianity Studies* 5, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.46362/quaerens.v5i1.1472>.
- SlaveVoyages. "SlaveVoyages." Diakses 22 September 2025. <https://www.slavevoyages.org/assessment/estimates>.
- Sudhiarsa, Raymundus. "Christian Migrants and Their Living Faith in Mission: An Indonesian Perspective." *Transformation* 40, no. 2 (2023): 119–130. <https://doi.org/10.1177/02653788231151358>.
- Swamy, Muthuraj. "Refugee Migration Today: Challenges for Doing Theology." *Theology* 120, no. 5 (2017): 334–346. <https://doi.org/10.1177/0040571X17710196>.
- Taylor, Michael. *The Interest: How the British Establishment Resisted the Abolition of Slavery*. London: Bodley Head, 2020.
- Tomkins, Stephen. *The Clapham Sect: How Wilberforce's Circle Transformed Britain*. Chicago: Lion Hudson, 2012.
- _____. *William Wilberforce: The Life of the Great Anti-Slave Trade Campaigner*. Grand Rapids: Eerdmans, 2007.
- Walk Free. "Global Slavery Index." Diakses 8 November 2025. <https://www.walkfree.org/global-slavery-index/>.
- Wijaya, Yahya. "Negotiating Popular Culture and Public Theology in the Indonesian Context." *International Journal of Public Theology* (2024): 139–156.
- Wilberforce, William. *A Practical View of the Prevailing Religious System of Professed Christians: In the Higher and Middle Classes in This Country, Contrasted with Real Christianity*. London: T. Cadell, 1797.
- _____. *Real Christianity: A Practical View of the Prevailing Religious System of Professed Christians*. London: Hatchard, 1797.
- detikNews. "Capaian Kerja Satgas TPPO Polri, 1.794 Korban Diselamatkan." Diakses 7 November 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7711295/capaian-kerja-satgas-tpo-polri-1-794-korban-diselamatkan>.